

<KOP SURAT SATKER>(1)

Nomor :(2)(3)
Sifat :(4)
Lampiran :(5)
Hal : Penunjukan *User Admin Satker Aplikasi Gaji Web*

Yth. Kepala KPPN Kotabumi
Jl. Alamsyah RPN KM. 3 Kotabumi
Lampung Utara

Sehubungan dengan surat Kepala KPPN Kotabumi nomor S-621/KPN.0803/2022 tanggal 24 November 2022 hal Integrasi Belanja Pegawai Bagi Satuan Kerja Lingkup Kemenag T.A 2023, bersama ini kami sampaikan data pegawai yang ditunjuk sebagai *user Admin Satker* aplikasi Gaji Web Satker sebagai berikut :

Nama : (2)
NIP : (3)
Pangkat/Golongan : (4)
Jabatan : (5)
Kode>Nama Satker : (6)
Nomor HP : (7)
Alamat Email Aktif : (8)
Nomor Induk Kependudukan : (9)

Selanjutnya sebagai dokumen pendukung penunjukan pegawai sebagaimana tersebut di atas, bersama ini kami lampirkan **foto copy KTP** pegawai dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kuasa Pengguna Anggaran {satker} (14)

..... (15)

NIP (16)

<KOP SURAT SATKER>(1)

KEPUTUSAN KEPALA {satker} (1)

NOMOR : KEP-..... (2)

TENTANG

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI WEB

PADA SATUAN KERJA

.....{satker}..... (3)

KUASA PENGGUNA ANGGARAN {satker} (4)

- Menimbang : Bahwa dalam rangka persiapan Integrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Aplikasi Gaji Web yang akan dimulai pada Tahun Anggaran 2023, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan dan Penunjukan User Aplikasi Gaji Web pada Satuan Kerja (5)
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 jo. PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 jo. PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah;
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 1178 Tahun 2022 Tentang Integrasi Belanja Pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- f. Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-15/PB/PB.2/2022 tentang Integrasi Belanja Pegawai Bagi Satuan Kerja Lingkup Kemenag T.A 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala{satker}... (7) Tentang Penetapan User Pengguna Aplikasi Gaji Web Kantor {satker} (8) Tahun Anggaran{tahun}.... (9).

- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi Gaji Web pada Kantor{satker}... (10).
- Kedua : Seluruh User Pengguna Aplikasi Gaji Web sebagaimana lampiran diwajibkan sudah memiliki user aplikasi DIGIT agar dapat mengakses Aplikasi Gaji Web di laman gajikita.kemenkeu.go.id.
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : (12)

Pada Tanggal : (13)

Kuasa Pengguna Anggaran {satker} (14)

..... (15)

NIP (16)

PENETAPAN DAN PENUNJUKAN USER APLIKASI GAJI WEB PADA SATUAN KERJA
{satker} (3)

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Status Pegawai	Email yg terdaftar dalam Digit	Kode Satker	User Akun Digit	Level
1	{nama} {nip}	PNS/ Non PNS				Admin Satker
2	{nama} {nip}	PNS/ Non PNS				PPK
3	{nama} {nip}	PNS/ Non PNS				PPSPM
4	{nama} {nip}	PNS/ Non PNS				Bendahara Pengeluaran
5	{nama} {nip}	PNS/ Non PNS				PPABP
6	{nama} {nip}	PNS/ Non PNS				Operator (bisa lebih dari 1)

Kuasa Pengguna Anggaran {satker} (22),

..... (23)

NIP (24)

NO	PETUNJUK PENGISIAN
1	Nama Kantor Instansi Terkait
2	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
3	Nama Satuan Kerja
4	Nama Kantor Instansi Terkait
5	Nama satuan Kerja
6	Peraturan lainnya yang menjadi dasar pembuatan Surat Keputusan
7	Nama Kantor Instansi Terkait
8	Nama Kantor Instansi Terkait
9	Tahun Anggaran Terkait
10	Nama Kantor Instansi Terkait
11	Jangka waktu berlaku Surat Keputusan (Misal : Selama Tahun Anggaran 2021 atau Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru)
12	Tempat/Lokasi penerbitan Surat Keputusan
13	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
14	Nama Kantor Instansi Terkait
15	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
16	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
17	Nama Kantor Instansi Terkait
18	Nomor Surat Keputusan sesuai dengan urutan penomoran dan kode unit organisasi dari pejabat yang menandatangani Surat Keputusan
19	Tanggal, Bulan dan Tahun penerbitan Surat Keputusan
20	Nama Kantor Instansi Terkait
21	Tahun Anggaran Terkait
22	Nama Kantor Instansi Terkait
23	Nama Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan
24	NIP Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Surat Keputusan